

BAB III

INDEKS PEMBANGUNAN *GROSS NATIONAL HAPPINESS* (GNH)

Tidak semua negara di dunia menggunakan diskursus pembangunan ekonomi, yang menggunakan GDP sebagai indikator utama keberhasilannya. Beberapa negara memiliki indikator keberhasilan pembangunan sendiri yang berakar pada kultur maupun kepercayaan yang telah berkembang dalam waktu yang lama di negara tersebut. Salah satunya Bhutan yang menggunakan *Gross National Happiness* sebagai indeks pembangunan sekaligus indikator utama keberhasilan pembangunannya. Oleh sebab itu, bab ini membahas tiga pokok bahasan. Pertama yaitu penjelasan mengenai indeks pembangunan *Gross National Happiness*, beserta hubungannya dengan ajaran Buddha Mahayana. Kedua yaitu penjelasan tentang pilar-pilar *Gross National Happiness* dan bidang-bidang terlingkupi, yang sekaligus menjadi pembeda dengan diskursus pembangunan lain, khususnya pembangunan ekonomi. Ketiga yaitu contoh-contoh implementasi atau penerapan *Gross National Happiness* dalam lingkup domestik Bhutan.

3.1 Gross National Happiness Sebagai Indeks Pembangunan Bhutan

Gross National Happiness telah menjadi salah satu elemen penting dalam kebijakan pembangunan Bhutan, baik di tingkat domestik maupun internasional. GNH merupakan indeks pembangunan yang memandang utama kebahagiaan sebagai sesuatu yang universal dan lebih dari sekedar pendapatan atau hal-hal yang bersifat materialistik (Schroeder & Schroeder, 2014). Dilihat melalui sudut pandang GNH, secara filosofis kesejahteraan bukan sebuah tujuan akhir dari

pembangunan, tetapi sebuah jalan untuk menjadikan umat manusia yang seutuhnya, baik dari segi mental, emosi, sosial, maupun spiritual (Schroeder K. , 2017). Meskipun filosofi pembangunannya sudah mulai muncul sejak pemerintahan Raja Jigme Dorji Wangchuck, namun baru dikembangkan menjadi *Gross National Happiness* pada masa pemerintahan Raja Jigme Singye Wangchuck.

3.1.1 Sejarah *Gross National Happiness*

Sejarah *Gross National Happiness (GNH)* bermula saat terjadi perselisihan internal Kerajaan Bhutan mengenai siapa yang akan menjadi pemimpin kerajaan selanjutnya, pasca wafatnya Raja Ngawang Namgyal pada tahun 1651. Konflik internal tersebut dapat diakhiri oleh Ugyen Wangchuck dengan mengalahkan lawan politiknya dan mengambil kontrol terhadap pemerintahan. Ugyen Wangchuck juga membangun citra positif dirinya dengan menormalisasi hubungan Bhutan dengan Inggris dan Tibet pada tahun 1904 (Gallenkamp, *Democracy in Bhutan: An Analysis of Constitutional Change in a Buddhist Monarchy*, 2010). Dengan prestasi dan citra positif yang terbentuk, pada tahun 1907 Ugyen Wangchuck terpilih menjadi raja Bhutan secara konsensus.

Pasca terpilih, masyarakat Bhutan menaruh harapan pada Raja Ugyen Wangchuck untuk dapat mengembalikan kondisi Bhutan sebelum konflik terjadi. Yaitu Bhutan yang damai, harmoni, dan kembali pada nilai-nilai yang diajarkan oleh Buddha Mahayana. Harapan itu direspon dengan membangun banyak sekolah, infrastruktur dan sistem komunikasi, serta mempererat hubungan dengan para tokoh Buddha. Setelah Raja Ugyen Wangchuck wafat pada tahun 1926,

posisinya digantikan oleh anaknya yang bernama Jigme Wangchuck (Gallenkamp, *The History of Institutional Change in the Kingdom of Bhutan: A Tale of Vision, Resolve, and Power*, 2011).

Setelah Raja Jigme Wangchuck wafat, tahta kerajaan diturunkan kepada anaknya yang masih berumur 16 tahun, Jigme Dorji Wangchuck (Rosen, 2014). Setelah naik tahta, Raja Jigme Dorji Wangchuck mulai menerapkan sebuah filosofi pembangunan yang memiliki tujuan untuk membahagiakan rakyatnya. Selama kepemimpinannya, Raja Jigme Dorji Wangchuck berusaha untuk menghapuskan segala bentuk perbudakan dari seluruh sektor perekonomian, termasuk dalam sektor pertanian. Raja Jigme Dorji Wangchuck pun berusaha agar masyarakatnya dapat hidup tentram dengan dapat memiliki dan mengelola pertanian masing-masing. Selain itu Raja Jigme Dorji Wangchuck juga membangun jalan yang menghubungkan wilayah utara-selatan dan timur-barat untuk memperkancar perdagangan (Gallenkamp, *Democracy in Bhutan: An Analysis of Constitutional Change in a Buddhist Monarchy*, 2010).

Bagi Raja Jigme Dorji Wangchuck terdapat dua tujuan utama dalam pembangunan, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan. Secara tidak langsung hal ini mengandung makna bahwa dalam pembangunan bukan hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga bagaimana pembangunan tersebut bisa memunculkan dan bahkan meningkatkan kebahagiaan bagi seluruh rakyatnya. Raja Jigme Dorji Wangchuck pun telah mendeklarasikan tujuan pembangunan Bhutan tepat saat Bhutan diakui sebagai anggota PBB di tahun 1971 (Priesner, 2004). Gagasan pembangunan ini pun tidak hanya identik dengan Raja Jigme Dorji Wangchuck.

Namun gagasan ini telah menjadi pondasi utama arah pembangunan bagi penerusnya, yaitu Raja Jigme Singye Wangchuck, yang naik tahta pada tahun 1972

Kepemimpin Raja Jigme Dorji Wangchuck digantikan oleh Raja Jigme Singye Wangchuck setelah wafat pada tahun 1972. Raja Jigme Singye meneruskan filosofi tujuan pembangunan yang telah dicanangkan sebelumnya, yaitu dengan meningkatkan produksi industri, pertanian, dan mengairi listrik bagi seluruh masyarakat Bhutan (Kingdom of Bhutan, 1999). Namun berbagai bentuk usaha modernisasi tersebut juga diimbangi dengan pelestarian tradisi dan budaya serta perlindungan terhadap kelestarian lingkungan (Kingdom of Bhutan, 1999). Oleh karenanya, dengan melanjutkan filosofi pembangunan yang diinisiasi oleh pemimpin sebelumnya, Raja Jigme Singye Wangchuck kemudian menginisiasi *Gross National Happiness* atau GNH. Bagi Raja Jigme Singye Wangchuck, karena kebahagiaan menjadi tujuan utama, keberhasilan pembangunan tidak hanya bisa diukur dari segi ekonomi, tetapi juga harus diukur dari aspek sosial dan lingkungan (Briney, 2018). Bahkan karena inisiasinya tersebut, Raja Jigme Singye Wangchuck juga disebut sebagai Bapak Modernisasi Bhutan (*Father of Modern Bhutan*) (Ura, 2010). Setelah diadakannya pemilu pertama kali di Bhutan, Raja Jigme Singye Wangchuck kemudian digantikan oleh anaknya, Raja Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, yang secara berkelanjutan meneruskan implementasi dari *Gross National Happiness*.

Salah satu motivasi utama terbentuknya *Gross National Happiness* atau GNH tidak lepas dari adanya prinsip “*strive not to harm others*” atau berjuang tanpa merugikan orang lain (Tashi, 2004). Motivasi tersebut

merupakan bagian dari Buddha Mahayana dalam mencapai *nirvana*, yaitu manusia harus dapat hidup berdampingan dengan siapapun dan dimanapun agar mampu mencapai kebahagiaan yang diinginkan. Kebahagiaan akan diperoleh manusia apabila mereka dapat melakukan hal-hal yang memiliki dampak dan menciptakan situasi yang positif bagi lingkungannya. Sehingga prinsip yang dipegang dalam pembangunan tersebut secara tidak langsung dapat menjadi pendorong terciptanya kebahagiaan bagi masyarakat Bhutan.

Dengan semangat pemerintah Bhutan untuk menciptakan masyarakat GNH, maka harus ada keseimbangan dalam pembangunan secara ekonomi maupun spiritual. Sehingga untuk mewujudkan GNH tersebut harus melalui dua proses kebahagiaan. Pertama yaitu kebahagiaan moral dan spiritual. Dimana hal tersebut merupakan akibat dari adanya keyakinan (*saddha*), yaitu pemahaman akan aturan atau hukum (*dharma*) yang berlaku dengan menghindari lima hal, yaitu membunuh, mencuri, ketidaksucian, berbohong, dan mabuk (Chakraborty, Roy, Ghosal, & Vajpayee, 2017). Kedua yaitu kebahagiaan material yang diperoleh dari proses perkembangan ekonomi dengan tetap mengindahkan etika dan nilai-nilai yang ada (Chakraborty, Roy, Ghosal, & Vajpayee, 2017). Dalam hal ini pula GNH menempatkan kebahagiaan sebagai sebuah tujuan, sekaligus sebuah tanggungjawab yang harus dipenuhi bersama-sama (Chen, 2015).

3.1.2 Ajaran Buddha Mahayana dan *Gross National Happiness (GNH)*

Tujuan utama dari GNH dan pemerintah Bhutan sendiri adalah untuk menciptakan kebahagiaan secara

kolektif (Ura, An Introduction to GNH (gross national happiness), 2009). Hal ini tidak lepas dari GNH yang berakar pada nilai-nilai agama Buddha yang mayoritas dianut oleh masyarakat Bhutan, yaitu kasih, kebahagiaan, dan kedamaian (McCarthy, 2018). Padahal untuk memperoleh ketiga hal tersebut cukup sulit, dimana seseorang harus dapat keluar dari penderitaan. Tidak hanya berasal dari permasalahan sehari-hari, penderitaan juga hadir melalui sifat individualistis, serta sifat serakah dalam hal yang bersifat materialistik (Givel, 2015). Oleh karena itu, menurut Buddha sebuah kebahagiaan dapat diperoleh apabila seseorang telah mencapai *nirvana* (Givel, 2015). Diharapkan dengan mencapai *nirvana*, maka seorang individu akan mampu melepaskan diri dari segala bentuk penderitaan, termasuk keserakahan, kebencian, tipu daya kemewahan dunia. Sehingga kebahagiaan yang diinginkan pun dapat tercapai.

Untuk mencapai *nirvana*, maka seorang individu harus berbuat atau berkelakuan baik. Seorang individu harus dapat melakukan hal-hal yang baik, karena akan ada hukum timbal balik yang akan berlaku. Hal tersebut berkaitan dengan agama Buddha mempercayai adanya karma. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Dasho Karma Ura, Presiden *Centre of Bhutan Studies*, yang disampaikan pada tahun 2007 di Kota Thimphu (Givel, 2015). Bahwa bahwa segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam hidupnya pasti akan ada timbal balik atau “balasan” di kemudian hari baginya (Givel, 2015). Ketika seorang individu berbuat baik, maka sebenarnya ia sedang membangun timbal balik positif baginya di kemudian hari atau disebut dengan karma positif. Dengan timbal balik positif yang diterima, individu tersebut dapat menjadi

pribadi yang bahagia dan selalu bersyukur. Sebaliknya, apabila seseorang tersebut berbuat buruk, sebenarnya ia sedang membangun timbal balik negatif bagi dirinya di kemudian hari.

Untuk dapat menciptakan karma baik dan menjauh dari penderitaan, maka terdapat sebuah jalan yang dinamakan *Eightfold Path*. Jalan ini merupakan bagian dari Empat Kebenaran Mulia (Bodhi, 2006). Sekaligus merupakan sekumpulan solusi atau cara untuk dapat membebaskan diri dari penderitaan untuk mencapai suatu kebahagiaan (The Pursuit of Happiness, 2018). Menurut tulisan Michael Givel yang berjudul “*Mahayana Buddhism and Gross National Happiness*”, delapan jalan kebajikan *Eightfold Path* dapat terbagi menjadi tiga. Pertama yaitu *sila*, dimana mencakup hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan baik dan berbagi kasih, sebagai upaya menahan diri dari perilaku yang tidak baik (Thera, 2010). Sehingga *sila* tersebut mengandung 3 hal utama. Pertama yaitu *right speech*, dimana dalam kehidupan sosial setiap manusia harus dapat menjaga ucapannya agar tidak menyakiti orang lain dan menciptakan ketidakharmonisan. Kedua yaitu *right action*, dimana setiap manusia tidak boleh memiliki sifat merusak dan harus dapat menebarkan kasih terhadap lingkungan sekitar untuk mendapatkan hidup yang tenteram (Thera, 2010). Tindakan ini juga merupakan dorongan dari Buddha bahwa dalam hidup harus dapat saling menghargai antarsesama makhluk. Ketiga yaitu *right livelihood*, dimana dalam kehidupan atau hidup harus bisa saling berdampingan dan tidak boleh saling melukai dan menciptakan ketidakadilan antar makhluk hidup (Givel, 2015).

Kedua yaitu *samadhi* yang terdiri dari tiga hal utama. Pertama yaitu *right effort* yang merupakan bagian dari sebuah evolusi menyeluruh dari seorang manusia menjadi lebih baik (Sangharakshita, 2007). Kedua yaitu *right mindfulness* sebagai peningkatan kepekaan dalam rangka memperoleh kedamaian (Sangharakshita, 2007). Ketiga yaitu *right concentration* dimana merupakan tindakan yang diperlukan untuk dapat fokus dan mampu membebaskan pikiran dari segala gangguan untuk mencapai Nirvana (Givel, 2015). Hal ini mampu melatih seorang individu untuk bersabar dan fokus dalam menjalani kehidupan nantinya.

Ketiga yaitu *prajna* yang mengandung dua hal utama. Pertama yaitu *right understanding*, dimana seorang individu harus memahami bahwa dunia ini adalah fana. Bahwa segala bentuk keserakahan hanya akan membawa pada penderitaan. Sehingga segala bentuk keserakahan dan ego yang terus diikuti dipastikan dapat menjauhkan dirinya dalam mencapai *nirvana* (Givel, 2015). Kedua yaitu *right thought* dimana merupakan usaha untuk menjauhkan diri dari pikiran yang tamak dan keinginan untuk melukai atau merusak (Givel, 2015). Sehingga secara tidak langsung *right thought* tersebut dapat membantu seseorang untuk mendapat kebahagiaan dan kedamaian dari segi pikiran.

GNH memang sangat berkaitan dengan konsep kebahagiaan yang diajarkan oleh Buddha, khususnya berkaitan dengan *Eightfold Path*. Buddha juga mengajarkan bahwa menggantungkan kebahagiaan dengan pihak lain merupakan sesuatu yang salah, tetapi justru harus mengusahakan sesuai dengan nurani diri sendiri (Tashi, 2004). Hubungan kuat antara Buddha Mahayana dengan *Gross National Happiness* dapat

terlihat dalam konstitusi tertulis Bhutan. Dalam konstitusi tersebut, terdapat beberapa pasal yang membuktikan bahwa GNH dan ajaran Buddha Mahayana memiliki hubungan yang kuat. Beberapa diantaranya, pertama yaitu tertulis dalam pasal 3 ayat 1 yang menyatakan: “*(Mahayana) Buddhism is the spiritual heritage of Bhutan, which promote the principles and values of peace, non-violence, compassion, and tolerance*” (The Constitution of the Kingdom of Bhutan). Kemudian tertulis pula dalam pasal 2 ayat 2, bahwa raja Bhutan dibawah sistem dualisme agama-politik (*chhoe-sid-nyi*) wajib mengimplementasikan ajaran Buddha Mahayana dalam kehidupan bernegara. Hal tersebut didukung dengan adanya pasal 9 ayat 2 yang menyatakan: “*The State shall strive to promote those consitions that will enable the pursuit of Gross National Happiness*” (The Constitution of the Kingdom of Bhutan).

3.2 Empat Pilar *Gross National Happiness*

Gross National Happiness membawa sebuah pemikiran bahwa kebahagiaan dari setiap individu itu berbeda atau subjektif (UK Essays, 2013). Tidak semua orang menggunakan uang atau hal-hal yang bersifat materialistik sebagai sumber kebahagiaan (UK Essays, 2013). Ada yang bahagia karena sehat, mendapat pendidikan yang baik, dapat berkumpul dengan keluarga, bahkan bisa hidup sebagai petani sekalipun. Oleh sebab itu, pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada satu aspek dan harus menopang banyak aspek, agar pembangunan bisa lebih menciptakan kebahagiaan bagi setiap orang. Sehingga apabila terdapat seorang individu memiliki tingkat perekonomian yang rendah pun, ia tetap akan bisa bahagia (Asian Development Bank, 2016). Selain itu, mengakarnya pada ajaran Buddha Mahayana menjadikan

Gross National Happiness memiliki elemen pembangunan yang mampu merefleksikan nilai-nilai ajaran Buddha Mahayana, terutama tentang kebahagiaan dan keseimbangan. Melalui Raja Jigme Singye pula diajarkan bahwa sebenarnya pembangunan memiliki dimensi lain selain hanya berfokus pada ekonomi (The Planning Commission Secretariat Royal Government of Bhutan, 2000). Nilai-nilai ini lah yang membuat diskursus pembangunan GNH memiliki sifat lebih humanis. Seluruh refleksi nilai ini dapat terlihat melalui empat elemen GNH, yaitu:

3.2.1 Pembangunan Sosial Ekonomi Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan

Pilar ini didasari oleh pandangan Raja Jigme Dorji Wangchuck bahwa pembangunan Bhutan harus seimbang, yaitu dari segi materialistik maupun non-materialistik. Sehingga Raja Jigme Dorji Wangchuck mencetuskan tujuan pembangunan Bhutan “*prosperity & happiness*” atau kesejahteraan dan kebahagiaan (Mukherji & Sengupta, 2004). Tujuan pembangunan ini ikut dimaknai oleh penerusnya, Raja Jigme Signye, dalam memperkenalkan *Gross National Happiness* pada tahun 1980-an (The Planning Commission Secretariat Royal Government of Bhutan, 2000). Bahwa dalam pembangunan memang perlu adanya usaha untuk meningkatkan perekonomian untuk dapat menyelesaikan permasalahan sosial, terutama yang kaitannya dengan kemiskinan. Meskipun demikian dalam peningkatan kapasitas ekonomi tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang eksploitatif dan cenderung rakus. Karena hal tersebut akan menimbulkan kerusakan fisik dan non fisik, terutama kebahagiaan yang akan menjadi sulit untuk dicapai.

Menurut Jigmi H. Thinley dalam tulisannya yang berjudul “*What is Gross National Happiness?*”, terdapat tiga aspek GNH dalam mengukur ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pertama, yaitu penekanan yang sama akan pentingnya aktivitas, pertumbuhan, dan ukuran ekonomi (Thinley, 2007). Kedua, yaitu memperhatikan aspek-aspek kebahagiaan masyarakatnya, seperti aturan mengenai jam istirahat, waktu bagi keluarga, kesempatan untuk melakukan *social service*, dan lain sebagainya (Thinley, 2007). Kedua, yaitu adanya penekanan untuk melakukan distribusi pendapatan semaksimal mungkin (Thinley, 2007). Sehingga semua orang dapat merasakan pembangunan yang dicanangkan tanpa harus ada disparitas ekonomi yang besar antara satu individu atau kelompok masyarakat dengan yang lainnya.

Pilar ini sesuai dengan ajaran Buddha Mahayana yang menyangkut *sila* khususnya dalam hal *right livelihood*. Dimana dalam kehidupan setiap individu atau manusia harus dapat berperilaku adil terhadap sesama. Beberapa diantaranya adalah kebijakan pendidikan, layanan kesehatan, dan berbagai layanan sosial lainnya, khususnya bagi masyarakat miskin dan kurang beruntung (New World Culture, 2018). Pilar ini sesuai dengan ajaran Buddha Mahayana bahwa sumber kebahagiaan muncul dari hal-hal yang bersifat spiritual (hati dan pikiran) daripada berasal dari hal-hal yang bersifat eksternal (Dalai & Cutler, 2009). Sehingga solusi terbaik untuk mencapai kebahagiaan tersebut adalah menyeimbangkan spiritual dan material dalam kehidupan.

3.2.2 Konservasi Lingkungan

Kebahagiaan tidak hanya dapat dinilai dari seberapa banyak orang tersebut menerima, tetapi

bagaimana orang tersebut bisa memberikan bagi lingkungan sekitarnya. Sehingga dalam kebijakan pembangunannya, pemerintah Bhutan harus memperhatikan faktor lingkungan dan harus berkontribusi terhadap pemeliharaan lingkungan alam sekitar (Thinley, 2007). Hal ini tidak lepas dari sejarah masyarakat Bhutan yang memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap alam, yang salah satunya dapat dibuktikan dengan pertanian sebagai salah satu sektor yang berkontribusi besar dalam perekonomian Bhutan (Tobgay, 2006). Seperti dalam hal pangan, dimana mereka sangat mengandalkan pertanian dan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Diantaranya buah-buahan dan sayuran yang menjadi komoditas ekspor Bhutan (Christensen, Fileccia, & Gulliver, 2012). Ketergantungan inilah yang menyebabkan mereka merasa harus menjaga alam, agar alam secara terus menerus mau memberikan kebutuhan konsumsi bagi mereka. Apabila alam rusak, maka alam “enggan” untuk memberikan manfaatnya bagi masyarakat Bhutan. Bahkan, dalam konstitusi Bhutan tertulis sebuah komitmen untuk menjaga agar 60% tanah di Bhutan tetap menjadi hutan untuk selamanya (New World Culture, 2018). Selain pangan, masih banyak hal lain yang dapat membuktikan bagaimana masyarakat Bhutan sangat membutuhkan dan menggantungkan sebagian besar pemenuhan kebutuhannya terhadap alam, seperti obat-obatan tradisional, kebutuhan air bersih untuk konsumsi, dan lain sebagainya (Thinley, 2007). Sehingga kelestarian alam pun juga dapat memiliki pengaruh baik terhadap tingkat kesehatan masyarakat Bhutan itu sendiri.

Pilar ini memiliki kesesuaian dalam ajaran *sila*, dimana pada dasarnya dalam diri seseorang terdapat “tiga

pintu” yang dapat menjadi sumber dari terciptanya kebahagiaan tersebut, yaitu tubuh, lisan, dan pikiran (Givel, 2015). Dalam Buddha, ketiga pintu tersebut harus dijaga untuk tidak merusak lingkungan sekitar. Karena dalam Buddha telah dijelaskan bahwa lingkungan juga dapat merasakan “sakit” dan “senang” seperti yang dialami oleh seorang individu. Sehingga apabila seorang individu tidak mampu menjaga ketiga pintu tersebut dengan baik dan cenderung merusak, maka lingkungan sekitar mendapat dampak buruk dan menyebabkan lingkungan tersebut “sakit”. Sebaliknya, apabila individu tersebut dapat menjaga ketiga pintu tersebut untuk tidak berbuat merusak, maka lingkungan sekitar akan menjadi bersahabat dan sekaligus menciptakan kondisi yang menyenangkan (Givel, 2015). Pilar ini juga merefleksikan ajaran Buddha Mahayana yang mengajarkan bahwa dalam kehidupan harus menerapkan perilaku kehati-hatian dan kepedulian. Buddha mengajarkan bahwa siapapun yang ingin mengikuti jalannya, maka harus memiliki sifat mengasihi dan tidak melukai makhluk hidup lainnya, baik manusia, hewan, maupun vegetasi (Quang, 1996). Melalui penerapan perilaku kehati-hatian dan kepedulian, maka hidup yang dijalani oleh seorang individu menjadi tenang dan damai yang menjadi pendorong terciptanya kebahagiaan.

3.2.3 Pelestarian dan Promosi Kebudayaan

Pembangunan tanpa harus merusak atau merubah tatanan budaya masyarakat juga merupakan salah satu sumber kebahagiaan bagi masyarakat itu sendiri. Dalam konteks masyarakat yang berada di Bhutan, mereka memiliki kebudayaan yang secara turun temurun telah dilestarikan dan patut untuk dihormati. Penghormatan

tersebut juga dapat dituangkan dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk fisik, seperti cara berpakaian dan berperilaku, maupun yang non fisik seperti penghormatan terhadap leluhur dan alam (Thinley, 2007). Bagi Bhutan, GNH merupakan bagian dari kebudayaan mereka sebagai seorang manusia yang semestinya maupun sebagai sebuah keluarga (New World Culture, 2018). Selain itu, pada dasarnya kebudayaan penting sebagai sebuah identitas, baik dalam bentuk cara berfikir, agama, kesenian, pengetahuan, dan berbagai bentuk aspirasi (Bogoda, 2005). Hal ini menjadi salah satu bagian dari pilihan hidup masyarakat untuk menciptakan identitas tersendiri bagi masyarakat Bhutan, sekaligus mampu menghadapi tantangan masa depan yang berasal dari norma-norma lain yang masuk (GNH Centre Bhutan, 2018).

Pilar ini sesuai dengan ajaran *samadhi*, dimana manusia harus mampu menghindarkan diri dari hal-hal yang bersifat negatif (Givel, 2015). Sehingga tindakan yang harus dilakukan adalah bagaimana menjaga hal-hal positif harus tetap ada di di tengah-tengah masyarakat. Sehingga ketika kebudayaan dan norma-norma baiknya dapat dipertahankan, maka secara tidak langsung dapat memberikan ketenangan dan kebahagiaan bagi masyarakat tersebut.

3.2.4 Good Governance

Pemerintahan yang baik merupakan pemerintahan yang proaktif terhadap perubahan dan mampu mewakili suara dari seluruh masyarakat (New World Culture, 2018). Pemerintahan yang demokratis pun dinilai menjadi salah satu faktor kebahagiaan masyarakat sutau negara. Seperti dalam nilai-nilai demokrasi,

kebahagiaan masyarakat tidak akan tercapai apabila terdapat dua faktor: tidak ada *check and balance* sehingga kebahagiaan yang masyarakat inginkan sulit atau tidak dapat terpenuhi dan tidak adanya nilai-nilai kerelaan dalam institusi pemerintah untuk secara tulus membantu masyarakat mencapai kebahagiaan tersebut (Thinley, 2007). Kondisi ini hanya dapat dicegah atau ditanggulangi dengan adanya *good governance* (pemerintahan yang baik atau sehat).

Secara keseluruhan, terdapat tiga nilai ajaran Buddha Mahayana yang terepresentasikan melalui *good governance*. Pertama, yaitu kebenaran sebagai pedoman (Ahmad, 2012). Artinya, pemerintahan yang baik merupakan pemerintah yang menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, dan amanah. Sehingga apabila suatu pemerintahan menggunakan pedoman ini, akan mendorong berkurangnya tindakan-tindakan buruk yang berdampak pada meningkatnya tingkat akuntabilitas pemerintahan. Kedua, yaitu *vinay*, yang berarti bahwa hasil kerja merupakan produk dari kebiasaan (Ahmad, 2012). Hal ini dapat diartikan bahwa perbuatan baik, khususnya nilai kebenaran dan kejujuran, harus selalu dibiasakan. Ketika perbuatan baik selalu dibiasakan dalam sebuah pemerintahan, maka secara tidak langsung dapat terefleksikan melalui terciptanya kinerja yang baik pula dalam pemerintahan. Ketiga, yaitu *nirvana* sebagai sebuah kebebasan secara total dari segala bentuk penderitaan (Ahmad, 2012). Artinya bahwa pemerintahan yang baik dan bersih tidak akan hanya berpengaruh baik pada internal pemerintahan itu sendiri, tetapi juga seluruh masyarakatnya. Dengan terus melakukan kebiasaan baik, menjunjung tinggi nilai kebenaran dan kejujuran, maka

negara tersebut akan terbebas dari segala bentuk permasalahan dan penderitaan.

Good governance ini juga sesuai dengan ajaran *prajna*, dimana manusia harus mampu memiliki sifat memahami sesama dan menjauhkan diri dari sifat tamak dan merusak (Givel, 2015). Hal ini berkaitan dengan permasalahan pemerintahan yang tidak lepas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dampaknya akan banyak kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat, yang menyebabkan tingkat kepuasan dan kepercayaan terhadap pemerintah yang cukup rendah. Dalam mengimplementasikan ajaran *prajna*, pemerintah Bhutan harus memiliki prinsip menolong dalam setiap kebijakan pembangunan yang dikeluarkan. Terutama bagi para pengambil keputusan di dalam pemerintahan Bhutan, mereka harus dapat menekankan prinsip tersebut dalam mengambil kebijakan pembangunan apabila ingin menciptakan masyarakat yang bahagia (Thinley, 2007). Salah satu caranya dengan mempertimbangkan kebermanfaatan kebijakan, seperti siapa atau pihak mana saja yang ditolong, seberapa besar dampak positif dari adanya kebijakan tersebut, dan lain sebagainya. Dengan memegang prinsip tersebut, maka baik secara langsung maupun tidak langsung suatu pembangunan dapat mendorong terciptanya kebahagiaan dalam masyarakat.

Keempat pilar ini menjadi bagian penting dalam *Gross National Happiness*, berupa representasi nilai, tradisi, dan estetika Bhutan (SOTC, 2015). Dari empat pilar tersebut, GNH terbagi ke dalam sembilan bidang (Brooks, 2013). Tabel di bawah merupakan sembilan bidang dari *Gross National Happiness* yang dikutip dari tulisan Jeremy S. Brooks yang berjudul "*Avoiding the Limits to Growth: Gross National Happiness in Bhutan*

as a Model for Sustainable Development". Sembilan bidang tersebut adalah standar hidup, kesehatan, dan pendidikan yang identik dengan elemen pembangunan manusia (*human development*) (Ura, Alkire, Zangmo, & Wangdi, 2012). Kemudian penggunaan waktu, pemerintahan yang baik, serta ketahanan dan keanekaragaman ekologi yang identik dengan pembaharuan (Ura, Alkire, Zangmo, & Wangdi, 2012). Ketiga yaitu kesejahteraan psikologis, daya tahan masyarakat, dan keberagaman budaya yang identik dengan inovasi (Ura, Alkire, Zangmo, & Wangdi, 2012). Tabel di bawah juga merupakan contoh penelitian tentang kebahagiaan yang pernah dilaksanakan pada tahun 2010 (Brooks, 2013).

Tabel 3.1 Penjabaran empat Pilar *Gross National Happiness* dalam sembilan bidang beserta contoh indikatornya

Bidang	Indikator
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> -Literasi (kemampuan untuk membaca dan menulis dalam berbagai bahasa) -Tingkat pendidikan (durasi tahun belajar atau bersekolah) -Pengetahuan (pengetahuan akan legenda atau cerita fiksi lokal, festival lokal, lagu tradisional, penularan HIV/AIDS, dan Konstitusi) -Nilai-nilai (membunuh, mencuri, berbohong, menciptakan ketidakharmonisa dalam sebuah hubungan, dan penyimpangan seksual)
Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> -Kesehatan mental -Laporan status kesehatan diri -Jumlah hari dalam kondisi sehat dalam

	<p>satu bulan terakhir</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pengalaman dengan disabilitas atau penyakit dalam 6 bulan terakhir
Keaneekaragaman ekologi	<ul style="list-style-type: none"> -Isu-isu ekologi (tujuh isu lingkungan utama yang sering terjadi) -Tanggungjawab individu terhadap lingkungan -Kerusakan alam -Modernitas (kemacetan, minimnya ruang terbuka hijau, minimnya trotoar untuk pejalan kaki)
Pemerintahan yang baik	<ul style="list-style-type: none"> -Tanggapan terhadap pemerintah di tujuh area -Hak-hak dasar (tanggapan terhadap hak asasi di Bhutan) -Layanan (jauh dekatnya pusat kesehatan, metode pembuangan limbah, akses listrik, pasokan dan kualitas air) -Partisipasi politik (berpendapat dan memberikan suara dalam forum)
Penggunaan waktu	<ul style="list-style-type: none"> -Jumlah waktu untuk bekerja, termasuk kerja sukarela -Jumlah waktu untuk beristirahat
Keberagaman budaya	<ul style="list-style-type: none"> -Kefasihan dalam menggunakan bahasa local -Partisipasi dalam aktivitas kebudayaan dalam 12 bulan terakhir -Kemampuan seni (kemampuan dalam membuat 13 kerajinan tradisional) -Perilaku (mempraktikkan <i>Driglam Namzha (the way of harmony)</i> dalam berbagai kesempatan)
Ketahanan	<ul style="list-style-type: none"> -Donasi (waktu dan uang)

masyarakat	-Hubungan antarmasyarakat (rasa saling memiliki, rasa saling percaya dengan sesama) -Keluarga -Keamanan (jumlah korban tindakan kriminal dalam 12 bulan terakhir)
Kesejahteraan psikologi	-Kepuasan hidup -Pengalaman emosi positif dalam beberapa minggu terakhir -Pengalaman emosi negatif dalam beberapa minggu terakhir -Spiritualitas (tingkat spiritualitas, karma yang aling banyak dilakukan, frekuensi ibadah, frekuensi meditasi)
Standar hidup	-Aset -Rumah -Pendapatan rumah tangga

Sumber: *Avoiding the Limits to Growth: Gross National Happiness in Bhutan as a Model for Sustainable Development* oleh Jeremy S. Brooks.

Sembilan bidang GNH tersebut telah membawa Bhutan ke tingkat pendekatan pembangunan yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, GNH juga telah dikembangkan ke dalam 33 sub-indeks dan 151 variabel untuk mengukur dan memahami kebahagiaan, khususnya bagi rakyat Bhutan (Royal Bhutanese Embassy of India, 2016). Tidak seperti negara-negara lain, Bhutan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan dalam menjalankan pembangunan agar terus tetap berjalan seimbang. Bahkan GNH juga telah membawa sebuah norma baru di pemerintah Bhutan dalam menentukan suatu kebijakan maupun pendirian institusi negara, dengan tetap menjaga

keseimbangan antara modernitas dan tradisi (Asian Development Bank, 2016).

3.3 Implementasi Indeks Pembangunan Gross National Happiness di Bhutan

Sebagai negara yang menginisiasi *Gross National Happiness*, Bhutan telah menerapkan nilai-nilai GNH sejak lama dalam kehidupan masyarakatnya maupun lingkungan pemerintahannya. Secara lebih sepsifik, penerapan GNH di Bhutan dapat dibagi ke dalam beberapa contoh bidang, yaitu:

3.3.1 Pemerintahan

Dalam lingkup pemerintahan atau bidang *good governance*. Menurut Perdana Menteri Bhutan, Thinley, GNH merupakan kunci utama arah kebijakan ekonomi dan pembangunan Bhutan (Bisht, 2012). Salah satunya adalah dengan membentuk *Gross National Happiness Commission (GNHC)* yang berfungsi sebagai badan pengevaluasi untuk memastikan GNH menjadi bagian dari sebuah kebijakan, mulai dari fase perencanaan, pengambilan keputusan, hingga implementasinya (Bisht, 2012). Keberadaa GNHC dinilai sangat bermanfaat, karena menjadi pengontrol kebijakan pemerintah sekaligus memastikan agar aspek-aspek kebahagiaan masyarakat bisa terpenuhi.

3.3.2 Pendidikan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa GNH telah menjadi bagian dari kultur Bhutan. Pendekatan GNH terhadap pendidikan adalah bagaimana menciptakan edukasi dan pelatihan yang secara inkusif dapat memberikan pemahaman lebih tentang manusia dan fenomena alam yang terjadi (Hayward, Pannozzo, &

Colman, 2009). Oleh karena itu, salah satu solusinya adalah dengan melakukan internalisasi nilai-nilai GNH yang dilakukan sejak dini. Hal ini dapat dibuktikan dengan reformasi pendidikan di Bhutan pada tahun 2010 (Sherab, Maxwell, & Cooksey, 2014). Berdasarkan Kementerian Pendidikan Bhutan, seluruh sekolah yang ada di Bhutan wajib mengenalkan dan menginternalisasi nilai-nilai GNH melalui kurikulum pembelajaran maupun kegiatan ekstrakurikuler (Sherab, Maxwell, & Cooksey, 2014). Selain menanamkan nilai-nilai GNH, adanya reformasi ini bertujuan agar anak tidak hanya memiliki kemampuan akademik yang baik saja, tetapi juga memiliki kemampuan sosial yang baik, seperti memiliki hubungan yang baik, melatih mengembangkan emosi positif, dan bahkan mengetahui tujuan hidup (World Happiness Summit, 2018).

3.3.3 Kesehatan

Bhutan memiliki visi “*a nation with the best health*” (Adhikari, 2016). Bhutan juga memiliki prinsip bahwa kesehatan akan membawa kebahagiaan. Bahwa hubungan antara kesehatan dan kebahagiaan seperti analogi telur dan ayam; tidak akan ada kebahagiaan ketika sakit atau berada dalam kondisi tidak sehat dan *vice versa* (Centre for Bhutan Studies & GNH, 2018). Ketika seorang individu diberikan kesehatan, maka ia dapat beraktivitas normal, mengonsumsi berbagai jenis makanan tanpa perlu banyak khawatir, dan lain sebagainya. Apabila kita dapat melakukan semua kegiatan yang kita gemari maupun kegiatan yang kita kehendaki untuk dikerjakan, maka akan timbul rasa bahagia. Sehingga untuk menunjang kesehatan masyarakat, pemerintah Bhutan memberikan layanan kesehatan gratis, baik fasilitas

maupun apabila ada warga masyarakat yang harus rujuk ke rumah sakit di luar negeri (Tobgay, Dophu, Torres, & Na-Bangchang, 2014). Selain faktor GNH, kebijakan ini juga didasari konstitusi Bhutan yang tertulis: *“the States shall provide free access to basic public health services in both modern and traditional medicines”* (Adhikari, 2016). Bahkan di Bhutan tidak ada rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang diprivatisasi (Tobgay, Dophu, Torres, & Na-Bangchang, 2014). Mengingat 70% masyarakat Bhutan tinggal di daerah pedesaan, maka pemerintah Bhutan juga membangun klinik-klinik lokal dan terus menambah jumlah rumah sakit (Andaman Medical, 2017). Fasilitas dan layanan kesehatan ini jauh lebih baik daripada tahun 1961, ketika Bhutan hanya memiliki dua rumah sakit, dua dokter, dan dua perawat (Yangchen, Tobgay, & Melgaard, 2016). Selain itu pemerintah Bhutan juga membangun sistem kesehatan yang bernama *The National Health Promotion Strategic Plan (NHPSP)*, yang bertujuan membentuk kebijakan kesehatan publik dengan pendekatan GNH secara menyeluruh (Andaman Medical, 2017).

3.3.4 Lingkungan

Lingkungan secara khusus menjadi aspek penting dalam implementasi GNH di Bhutan karena sejarah ketergantungan mereka dengan alam, termasuk mayoritas penduduknya yang masih bergantung pada pertanian. Cukup banyaknya masyarakat Bhutan yang tinggal di daerah pegunungan membuat mereka memiliki sejarah panjang dalam mengelola sumber daya alam untuk menyeimbangkan kelestarian alam dan keanekaragaman hayati dengan pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan hidup (Sears, et al., 2017). Salah satu

bentuknya yaitu *sokshing*, yaitu cara menjaga kesuburan tanah secara tradisional dengan mengumpulkan dedaunan yang jatuh di hutan (Sears, et al., 2017).

3.3.5 Penggunaan Waktu

Bhutan mempercayai prinsip bahwa waktu yang terbatas harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan kondisi perekonomian dan kesejahteraan menjadi lebih baik (Centre for Bhutan Studies & GNH, 2018). Mengetahui penggunaan waktu dari masyarakatnya membuat Bhutan lebih mengetahui pola aktivitas dari setiap kelompok umur, jenis kelamin, dan kategori lainnya. Dari pemahaman tersebut dapat diketahui aktivitas apa saja yang membuat masyarakat Bhutan bahagia, seperti beribadah, berolahraga, dan aktivitas lainnya yang dapat memicu kebahagiaan (Galay, 2010). Dengan penelitian tentang penggunaan waktu inilah pemerintah Bhutan juga menjadikannya sebagai salah satu komponen pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembangunan seperti apa yang dapat menunjang kebahagiaan masyarakatnya.

3.3.6 Kebudayaan

Tidak dapat dipungkiri bahwa negara-negara di dunia sedang menghadapi tantangan globalisasi dan modernitas untuk terus menjaga kebudayaannya, termasuk Bhutan. Namun menurut salah satu anggota dewan nasional Bhutan, Tashi Wangyal, kebudayaan, tradisi, dan bahasa menjadi sebuah faktor pembeda yang sanggup membuat Bhutan tetap bertahan (Topping, 2014). Salah satunya dibuktikan dengan sebuah rezim pelestarian budaya *Heritage Sites Bill*. Dalam rangka mengimplementasikan GNH dan dengan dasar rezim tersebut, masyarakat

Bhutan menggunakan baju tradisional di lingkungan pemerintahan dan sekolah serta menjaga beberapa situs penting di Bhutan (Topping, 2014). Sebanyak enam situs yang sesuai kualifikasi *Heritage Sites Bill* pun ditetapkan dalam sebuah workshop yang bertajuk “*Management of Culture Sites for Cultural Landscape Sustenance*”, yaitu: Desa Buli di Zhemgang, Desa Ramtoe di Samtse, Desa Ura Doshi di Bumthang, Desa Nabji di Trongsa, serta Desa Gangtey dan Desa Rinchengang di Wangdue Phodrang (Choden, 2017). Situs-situs ini akan dikembangkan sebagai tempat wisata dengan keunikan budaya dan tradisi sebagai daya tariknya. Selain itu, demi menunjang pembangunan yang merata, turis-turis akan diarahkan untuk menginap di *homestays* milik warga (Topping, 2014). Sehingga perputaran uang dan pembangunan tidak hanya berpusat di kota saja, tetapi hingga pelosok desa, yang sekaligus dapat mempromosikan dan melestarikan kehidupan tradisional masyarakat Bhutan.